



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

## LAPORAN PENELITIAN

### PEMAHAMAN POLITIK DAN IDENTIFIKASI KEPARTAIAAN PEREMPUAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PERILAKU MEMILIH (Kasus Pemilu 1999 di Kota Padang)

Oleh :

Drs. Suryanef, M.Si.  
Dra. Al Rafni, M.Si.

83 NOV, '04

580/12/2004-p.1(c1)

324.623 SUR-p①

DIBIYAI OLEH PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN  
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR : 093/P4T/DPPM/DM, SKW, SOSAG/III/2004  
TANGGAL 25 MARET 2004  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

OKTOBER, TAHUN 2004

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>RINGKASAN DAN SUMMARY</b>	iv
<b>PRAKATA</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	8
A. Teori Perilaku Memilih	8
B. Perempuan dalam Setting Politik di Indonesia	10
C. Variabel Penjelas Perilaku Memilih	14
<b>III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	19
A. Tujuan Penelitian	19
B. Manfaat Penelitian	19
<b>IV. METODE PENELITIAN</b>	20
A. Hakekat dan Jenis Penelitian	20
B. Populasi dan Sampel	20
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data	21
E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	21
F. Teknik Analisa Data	23
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	25
A. Pemahaman Politik	25
B. Identifikasi Kepartaian	33
C. Perilaku Memilih	39
D. Pengujian Hipotesis	43
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	49
<b>LAMPIRAN</b>	51

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1.	a. Judul Penelitian	Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Kontribusinya Terhadap Perilaku Memilih (Kasus Pemilu 1999 di Kota Padang)
	b. Kategori Penelitian	II
2.	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Suryanef, M.Si.
	b. Jenis Kelamin	Laki-laki
	c. Pangkat/Gol./NIP	Pembina/IVa/131945223
	d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	Ilmu-ilmu Sosial/Ilmu Hukum
	f. Univ./Inst./Akademi/Sekolah Tinggi	Universitas Negeri Padang
	g. Bidang Ilmu yang Diteliti	Ilmu Politik
3.	Jumlah Tim Peneliti	2 orang
4.	Lokasi Penelitian	Kota Padang
5.	Bila penelitian merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan	
	a. Nama Institusi	-----
	b. Alamat	-----
6.	Jangka Waktu Penelitian	8 bulan
7.	Biaya yang Diperlukan	Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Mengetahui  
Dekan FIS UNP Padang



Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.  
NIP. 131584117

Padang, Oktober 2004  
Ketua Peneliti,

Drs. Suryanef, M.Si.  
NIP. 131945223

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian,



Prof. Dr. H. Agus Irianto  
NIP. 130879791

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas dengan surat perjanjian kerja No.093/P4T/DPPM/DM,SKW,SOSAG/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 untuk melakukan penelitian dengan judul *Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Kontribusinya terhadap Perilaku Memilih (Kasus Pemilu 1999 di Kota Padang)*.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang.

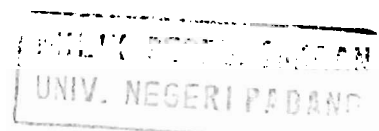
Terima kasih.

Padang, Nopember 2004

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. H. Agus Irianto  
NIP. 130879791



## RINGKASAN PENELITIAN

### A. Judul Penelitian

Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Kontribusinya Terhadap Perilaku Memilih (Kasus Pemilu 1999 di Padang)

Oleh : Suryanef dan Al Rafni  
Tahun Penelitian : 2004  
Jumlah Halaman : ix + 48 halaman

### B. Ringkasan Penelitian

Jumlah pemilih perempuan dalam pemilu 1999 di Indonesia 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar. Sementara itu untuk tingkat lokal, Provinsi Sumatera Barat sekitar 52,46% dan Kota Padang 51,61%. Tetapi kontribusi besar yang diberikan perempuan dalam konteks ini tidak sebanding (pararel) dengan kedudukan dan hak-hak politik yang dimilikinya. Penelitian ini mengungkapkan seberapa besar pengaruh pemahaman politik dan identifikasi kepartaian perempuan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku memilihnya dalam pemilu 1999 di Kota Padang. Selain itu pertanyaan lain yang ingin dijawab adalah faktor manakah yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap perilaku pemilih perempuan serta apakah terdapat perbedaan antara perilaku pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian survai yang di dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesahihan dan keterandalan instrumen penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan jumlah sampel ditetapkan 200 orang perempuan dan 100 orang laki-laki, yang diambil secara proporsional random sampling. Sementara itu analisis menggunakan uji statistik multi-regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman politik perempuan masih rendah atau tidak terlalu dalam, hanya untuk hal-hal yang menyangkut nuansa kepolitikan riil yang dapat dipahami dengan baik. Sementara itu identifikasi kepartaian mereka lebih cenderung ke arah cukup kuat, tidak banyak yang mempunyai ikatan psikologis kuat dengan partai yang dipilihnya. Paralel dengan pemahaman

politik serta identifikasi kepartaian ini, maka perilaku memilihnya pun berada pada derajat yang cukup aktif.

Secara kuantitatif, kedua variabel independen (pemahaman politik serta identifikasi kepartaian) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih perempuan. Keduanya mampu menjadi variabel penjelas sebesar 26,5%. Dengan kata lain perilaku pemilih perempuan sebesar 73,5% dipengaruhi variabel lainnya seperti status sosial ekonomi, juru kampanye, isu kampanye serta dimensi sosiologis-psikologis lainnya. Dalam hal determinan yang paling berpengaruh terhadap perilaku pemilih perempuan ternyata identifikasi kepartaian lebih berkontribusi dibandingkan dengan pemahaman politik (48,6% : 9,3%). Selanjutnya hasil temuan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian secara keseluruhan hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima.

### **C. Identitas Kelembagaan**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Nomor Kontrak : 093/P4T/DPPM/DM,SKW,SOSAG/III/2004

ILIK PERPUSTAKAAN  
ERI PADANG

## SUMMARY

### A. Research Title

POLITICAL UNDERSTANDING AND PARTY SYSTEM IDENTIFICATION OF WOMEN AND ITS CONTRIBUTION TO THE VOTERS' INTERESTS (THE CASE OF GENERAL ELECTION 1999 IN PADANG CITY)

Researchers : Suryanef and Al Rafni  
Year of Research : 2004  
Amount Of Page : x + 50 pages

### B. Research Summary

The amount of women voters in general election 1999 in Indonesia is around 57% of all registered voters. For the local level, the amount of the voters in West Sumatera province is around 52,46%, and for Padang City is around 51,61%. The positive contribution of the women voters in this context is not parallel with the status and political rights they have. This research tried to reveal the simultaneous influence of political understanding and party system identification of the women towards their interest in general election 1999 in Padang City. Besides, the other question is: what is the dominant factor contributed in their electing, and are there differences between women and men in their voters' interests.

Quantitative approach was used in this survey research. The data was collected through questionnaires. Before the questionnaires were spread to the respondents reliability and validity test was done to them. This research was conducted in Padang City with the sampel consisted of 200 women and 100 men. The sample was obtained through *proportional random sampling*. The data was analyzed with statistical test of *multi-regression*.

The finding of this research indicates that the political understanding of women is still low in common, but their political understanding seemed better in certain aspect connecting with the real politic. While their party system identification tended to be higher and did not have psychological interests with the party they chose. Parallel to this condition, the voters' interests are also in enough active level.

Quantitatively, the two independent variable above (political understanding and party system identification) gave significant influences to the voters' interests of women. They could become independent variable equal to 26,5%. In other words, the variable of voters' interests of women, 73,5%, was influenced by the other variables, like social-economic status, the master of campaign the issue of campaign, and other sociological-psychological dimensions, In this condition, party system identification of the woman is determinant factor that give more contribution to the voters' interests of women than their political understanding (48,6% : 9,3%). And then, the finding of this research also indicated that there is significant difference between voters' interests of women and those of men. Therefore, hypothesis in this research could be accepted generally.

### **C. Institutional Identity**

Departement of Science of Law, the Faculty of Social Sciences, the State  
University of Padang

Number of Agreement : 093/P4T/DPPM/DM, SKW, SOSAG/III/2004



## PRAKATA

Penelitian ini merupakan upaya dalam memperkaya referensi studi tentang perilaku memilih di Indonesia. Konstruksi penelitian ini mengungkapkan pengaruh pemahaman politik dan identifikasi kepartaian perempuan terhadap perilaku memilihnya dalam pemilu 1999. Kami sebagai peneliti merasa yakin bahwa bagaimana pun upaya optimal yang telah dilakukan, penelitian ini tetap memiliki kelemahan, apalagi fokus kajian mengarah pada even yang berlalu dalam hal ini pemilu 1999. Hanya saja dalam konteks ini, koridor ilmiah tetap menjadi acuan utama peneliti.

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi yang besar dari berbagai pihak. *Pertama*, Direktorat Pembinaan Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional selaku penyandang dana. *Kedua*, Lembaga Penelitian UNP melalui Ketua dan Sekretaris serta stafnya yang telah memfasilitasi, baik secara administratif maupun dukungan moril. *Ketiga*, Pemerintah Kota Padang dengan segenap jajarannya. *Keempat*, elemen yang sangat penting adalah para responden yang berkenan meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner guna memperoleh data. Oleh karena itu, sewajarnya jika peneliti pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi bagi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga temuan penelitian ini dapat memberikan informasi penting dalam kajian Ilmu Politik serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, khususnya aktor serta institusi politik.

Padang, Oktober 2004

Peneliti,

Suryanef dan Al Rafni

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Jumlah Perempuan dan laki-laki dalam Lembaga Pengambil Keputusan Politik	
Tabel 2	: Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-laki di DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Prov. Sumbar	2
Tabel 3	: Pemahaman Politik Responden	26
Tabel 4	: Distribusi Responden Menurut Tingkat Pemahaman Politik	32
Tabel 5	: Distribusi Responden Menurut Identifikasi Kepartaian	35
Tabel 6	: Distribusi Responden Menurut Sikap Terhadap Partai Yang Dirasa Paling Dekat	35
Tabel 7	: Reaksi Responden Terhadap Pelecehan Pada Partainya	36
Tabel 8	: Distribusi Responden Menurut Tingkat Dukungan Terhadap Partai	36
Tabel 9	: Alasan Responden Mengidentifikasi Diri dengan Partai Pilihannya	37
Tabel 10	: Distribusi Responden Menurut Derajat Identifikasi Kepartaian	38
Tabel 11	: Distribusi Responden Menurut Pilihan Partai Pada Pemilu 1999	39
Tabel 12	: Distribusi Responden Menurut Faktor Penentu Pilihan Partai Pada Pemilu 1999	40
Tabel 13	: Bentuk Aktifitas Responden dan Derajatnya Dalam Mendukung Partai Pilihannya	41
Tabel 14	: Distribusi Responden Menurut Derajat Perilaku Memilih	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Raw Data**
- Lampiran 2 : Correlation and Regression**
- Lampiran 3 : T-test**
- Lampiran 4 : Curriculum Vitae Peneliti**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penduduk, termasuk di dalamnya kaum perempuan, adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara adalah mutlak dan sangat diperlukan. Tanpa mengikutsertakan perempuan dalam proses pembangunan bangsa dan negara, itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan bangsa dan negara.

Satu contoh kongkrit pada pemilu 1999 ini, berdasarkan hasil penelitian Asia Foundation sebagaimana dikutip oleh *Rina Morita (1999)* di Indonesia terdapat pemilih perempuan yang berjumlah 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar. Ini merupakan sebuah potensi dan kekuatan besar yang perlu disadari oleh kaum perempuan dimana pada even politik yang sangat penting pun (seperti pemilu) keberhasilannya juga turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Pada tingkat lokal seperti Provinsi Sumatera Barat juga ditemui fenomena yang sama dimana pemilih perempuan yang terdaftar pada pemilu 1999 adalah 1.240.306 orang (52,46%) dari keseluruhan pemilih. Sementara itu untuk kota Padang dari 396.048 pemilih, 204.395 (51,61%) diantaranya adalah perempuan.

Sayangnya besarnya kontribusi yang diberikan perempuan pada even politik seperti pemilu tersebut tidak sebanding (paralel) dengan kedudukan dan hak-hak politik yang dimilikinya. Satu contoh kongkrit dapat dikemukakan lemahnya

partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan di tingkat publik. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pembuat kebijakan atau pengambilan keputusan politik di Indonesia dapat dicermati melalui tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1 : Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam Lembaga Pengambil Keputusan Politik

No.	Lembaga	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	% Perempuan
1.	MPR	18	177	9,2
2.	DPR	45	455	9
3.	MA	7	40	14,8
4.	BPK	0	7	0
5.	DPA	2	43	4,4
6.	KPU	2	9	18,1
7.	Gubernur	0	30	0
8.	Bupati	5	331	1,5

Sumber : Perspektif Edisi II (2001).

Tabel 2 : Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-laki di DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Provinsi Sumatera Barat

No.	Daerah	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	% Perempuan
1.	Provinsi Sumatera Barat	3	49	6,12
2.	Kabupaten Agam	1	38	2,63
3.	Kabupaten Pasaman	1	44	2,27
4.	Kabupaten 50 Kota	0	35	0
5.	Kabupaten Solok	2	35	5,71
6.	Kabupaten Padang Pariaman	1	44	2,27
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	1	39	2,56
8.	Kabupaten Tanah Datar	0	31	0
9.	Kabupaten Swl. Sijunjung	3	30	10
10.	Kota Padang	1	41	2,43
11.	Kota Padang Panjang	1	15	6,66
12.	Kota Solok	0	20	0
13.	Kota Sawah Lunto	1	18	5,55
14.	Kota Bukittinggi	2	18	11,11
14.	Kota Payakumbuh	2	22	9,09

Sumber : Diolah dari data Direktorat SOSPOL Sumbar (2001).

Contoh lain dapat dilihat *Human Development Report 1995 United Nation Development Programme (UNDP)* sebagaimana yang dikutip oleh *Gaffar (1996)*, memberikan sorotan tentang posisi kaum perempuan di dunia termasuk perempuan Indonesia. *UNDP* secara khusus memberikan sorotan tentang kontribusi yang besar dari kaum perempuan terhadap ekonomi akan tetapi pengakuan yang diperolehnya ternyata jauh lebih rendah dari kaum laki-laki. Lebih rinci dalam laporan tersebut dipaparkan bahwa hanya 7% kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki yang menempati jabatan *administrative and managerial position*.

Fakta-fakta di atas secara langsung berbicara sendiri betapa masih lemahnya kedudukan politik perempuan wanita di Indonesia. Lebih ironis lagi *Vicky Randall (1982)* sebagaimana dikutip *Siagian (1996)* mengungkapkan bahwa alasan terbanyak keberadaan perempuan dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik adalah karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu seperti ayah, suami, mertua dan sebagainya.

Realitas yang telah dikemukakan sebelumnya telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo. *Anders Uhlin (1997)* mengungkapkan struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde Baru dapat ditemui dalam *kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarki dan menjadikan wanita sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah terutama menjelang pemilu*.

Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang serius bagaimana sesungguhnya pemahaman politik perempuan serta preferensi politik mereka terhadap suatu partai dan bagaimana pula perilaku-memilih perempuan dalam pemilu. Dengan mengetahui hal ini diharapkan dapat dilakukan identifikasi langkah-langkah berikutnya bagi pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1999.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Seberapa signifikan pemahaman terhadap politik dan identifikasi kepartaian secara simultan menentukan perilaku-memilih perempuan pada pemilu 1999 di Kota Padang ?
2. Di antara berbagai faktor determinan tersebut, manakah yang sangat berpengaruh terhadap perilaku-memilih perempuan pada pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur?
3. Apakah terdapat perbedaan antara perilaku-memilih perempuan dengan laki-laki pada pemilu 1999 di Kota Padang?

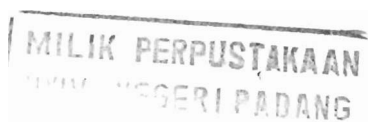
Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman terhadap politik dan identifikasi kepartaian secara simultan terhadap perilaku-memilih perempuan pada pemilu 1999 di Kota Padang.
2. Identifikasi kepartaian merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan perilaku-memilih perempuan pada pemilu 1999 di Kota Padang.
3. Terdapat perbedaan antara perilaku-memilih perempuan dengan laki-laki pada pemilu 1999 di Kota Padang.

Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka dirasa perlu untuk mengemukakan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini berikut indikator dan pengukurannya.

1. Pemahaman politik adalah seberapa jauh pemahaman responden dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. peranan lembaga perwakilan rakyat.
- b. perbedaan dan persamaan MPR dengan DPR dari segi struktur dan fungsinya.
- c. keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan.
- d. kekuasaan kepresidenan.
- e. hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara.
- f. perbedaan pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara.
- g. pelayanan yang diberikan birokrasi terhadap warga negara.
- h. partai politik dan dan perannya .





- i. pelaksanaan pemilu
- j. kebebasan pers.
- k. kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengadakan demonstrasi.

2. Identifikasi kepartaian adalah orientasi dan sikap yang dimiliki seseorang sehingga mereka merasa dekat dengan partai atau organisasi politik tertentu. Indikatornya adalah :

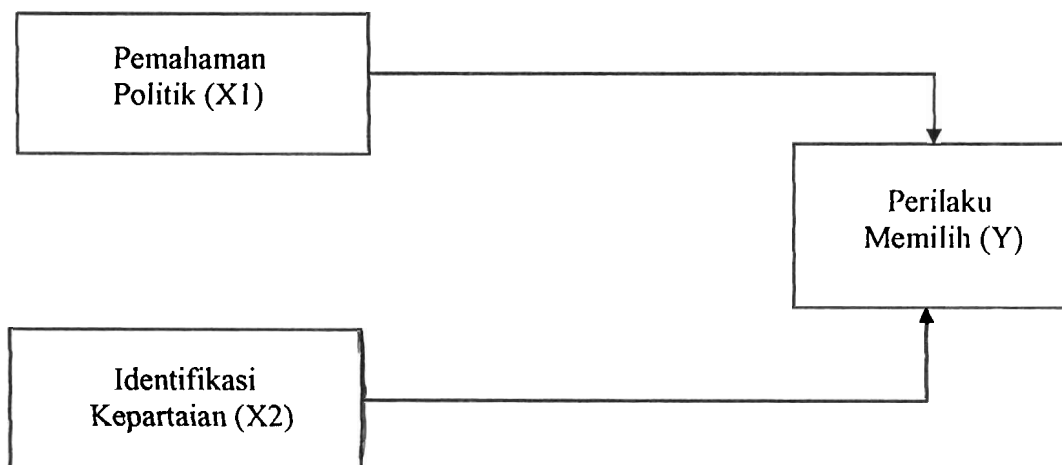
- a. derajat simpati atau keterikatan secara psikologis seseorang terhadap partai yang didukungnya.
- b. derajat fanatisme seseorang terhadap partai yang didukungnya.

3. Perilaku memilih adalah konsistensi seseorang untuk mendukung dan akhirnya memilih partai politik tertentu dalam pemilu. Partai politik yang dimaksud adalah kekuatan sosial politik sebagaimana yang dimaksud oleh UU No.3 tahun 1999. Indikatornya adalah derajat aktivitas individu mendukung partai pilihannya.

Pengukuran semua variabel penelitian dikemas dalam bentuk daftar pertanyaan dengan jawaban berbentuk skala Likert yang dimodifikasi. Dengan demikian setiap jawaban responden akan diberi skor dengan rentangan 1 sampai 5. Selanjutnya pengkategorian setiap variabel terlihat pada matriks berikut ini.

No.	Skala Interval	Kategori		
		Derajat Pemahaman Politik	Derajat Identifikasi Kepartaian	Derajat Perilaku Memilih
1.	4,21 – 5,00	Sangat baik	Sangat kuat	Sangat aktif
2.	3,41 – 4,20	Baik	Kuat	Aktif
3.	2,61 – 3,40	Cukup baik	Cukup kuat	Cukup aktif
4.	1,81 – 2,60	Kurang	Lemah	Tidak aktif
5.	1,00 – 1,80	Kurang sekali	Lemah sekali	Sangat tidak aktif

Sehubungan dengan variabel-variabel penelitian di atas, maka model analisis yang dibangun adalah sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Perilaku Memilih

Untuk mengkaji perilaku memilih diperlukan pemahaman yang cermat terhadap dua pendekatan dominan dalam studi ini. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis mencermati perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian pemahaman terhadap pengelompokan sosial, baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik. Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi politik seseorang terhadap salah satu partai politik merupakan produk dari karakter sosial ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992 : 5). Dengan kata lain pola memilih seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya.

Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dari asumsi penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh sebab itu konsep sikap dan sosialisasi merupakan hal yang amat penting dalam pendekatan ini.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana seseorang itu hidup. Sedangkan sosialisasi politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974 : 44). Dengan demikian, pendekatan ini percaya pada apa yang disebut sebagai “agen” dari sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, partai politik dan organisasi massa, tempat bekerja dan sebagainya.

Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang disebut identifikasi kepartaian (*party identification*). Identifikasi partai ini merupakan konsep yang amat penting dalam pendekatan psikologis. Mereka berpendapat bahwa identifikasi partai merupakan faktor penjelas yang dominan terhadap perilaku memilih (*voting behavior*). Sebagaimana pengakuan Czudnowski (1976 : 76) berikut ini :  
*“this approach also particularly adequate for the analysis of voting in the United States, where “party identification” has been found to be the single most important variable determining voting preferences.”*

Pemaparan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa bagi penganut pendekatan psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengaruh antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.

## **B. Perempuan dalam Setting Politik di Indonesia**

Perempuan sebagai bagian dari warga negara secara legalitas mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Namun dalam perangkat kebijakan pelaksana lain di bawahnya masih ditemukan beberapa perangkat kebijakan sebagai output dari sistem politik Orde Baru yang mencerminkan ketimpangan gender.

*Hadiz, dkk.* (1998) telah meneliti beberapa kebijakan dalam kepolitikan Orde Baru yang membakukan peran gender. Dari lima kelompok teks hukum yang diteliti yaitu teks GBHN sejak tahun 1973 sampai GBHN 1998, beberapa perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri dan beberapa peraturan daerah, dapat dicermati analisis mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembakuan peran gender dalam teks-teks tersebut. Sepanjang GBHN 1978 sampai 1998 kata *kodrat* tetap hadir dalam teks. Memang kata ini dapat diinterpretasikan secara berbeda. *Pertama*, sebagai reproduksi biologis seperti kemampuan perempuan mengandung, menyusui dan melahirkan. *Kedua*, tidak hanya sebatas kemampuan biologis diperluas ke wilayah sosial yakni karena perempuan yang melahirkan maka

peran mengasuh dan membesarkan anak merupakan kodratnya. Dengan demikian perempuan sajalah yang berperan ganda.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut negara Orde Baru telah membakukan peran jender yang berakibat domestikasi, marginalisasi dan eksploitasi ekonomi, beban ganda serta subordinasi seksual. Perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Demi kepentingan domestikasi tersebut negara Orde Baru bekerjasama dengan pengusaha kapitalis untuk menghasilkan pekerja perempuan yang patuh untuk menunjang industri, terutama industri ringan yang berorientasi ekspor. Pekerja wanita dianggap lebih murah dari segi upah.

Eksploitasi tenaga kerja perempuan di sektor publik pada industri yang berorientasi ekspor dengan upah yang rendah sekaligus dapat memarginalisasi perempuan, meletakkan perempuan di feri-feri kekuasaan dan tersubordinasi. Di samping didomestikasi secara ekonomi, perempuan juga didomestikasi secara politis yaitu mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitisasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan

politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut *Philippe C. Schmitter* (Alfred Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Wanita yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; (3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan wanita sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memposisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, *Mies* (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi gerakannya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam

rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik di republik ini sebenarnya bukan hal baru, karena mereka telah ikut serta secara aktif dalam perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjalanan partisipasi perempuan Indonesia dalam politik dapat ditinjau dari akseptabilitasnya. Akseptabilitasnya dalam politik sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan profesionalitas, hereditas, kekuatan ekonomi serta karena kedudukan suami. Hasil penelitian Agustono dan Emiyanti (1998) tentang perempuan dalam partai politik di Kotamadya Medan mengindikasikan *image of man*, dimana peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki.

Menurut Vina Salviana (1995) kelangkaan elit politik perempuan berkaitan dengan rendahnya kualitas perempuan sendiri dalam berpolitik. Maksudnya perempuan kurang memiliki greget dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kondisi ini kemungkinan dipengaruhi sistem patriarki. Rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa indikator antara lain : (1) pola partisipasi dan rekrutmen perempuan belum jelas ; (2) pola sosialisasi serta pendidikan politik perempuan belum mengakar ; (3) adanya dominasi laki-laki atas perempuan ; (4) faktor intern perempuan itu sendiri



yang lebih mementingkan rumah tangga (reproduksi sosial) ; dan (5) tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah. Dari lima faktor ini pola sosialisasi dan pendidikan politik perempuan merupakan kunci pemberdayaan perempuan dalam meraih hak-hak politiknya.

### **C. Variabel Penjelas Perilaku Memilih**

Penelitian ini menggunakan dua variabel penjelas dari perilaku memilih yaitu pemahaman politik dan identifikasi kepartaian. Satu per satu variabel penjelas tersebut akan diuraikan di bawah ini.

#### ***1. Pemahaman Politik***

Pemahaman terhadap politik maksudnya adalah seberapa jauh seseorang individu mampu menginterpretasikan dan mengaktualisasikan dirinya dalam memahami berbagai fenomena politik. Pemahaman ini sangat ditentukan oleh proses “belajar” atau proses sosialisasi yang diterima dalam kehidupannya. Sosialisasi dalam konteks ini adalah sosialisasi politik.

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan juga mereka yang menginjak dewasa. Prinsip dari sosialisasi itu adalah “*on transmission between generations and thus on continuity within the polity*” (Wasby, 1970 : 331). Dari hal ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa individu yang dijadikan objek sosialisasi politik bukan bersifat

pasif dan hanya menerima saja, melainkan individu yang mengalami proses sosialisasi sekaligus juga aktif mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik di mana ia hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Rush dan Althoff serta Kavanagh.

Menurut Rush dan Althoff, sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Wasby, 1970 : 331). Pendapat ini senada dengan pandangan Kavanagh (1982 : 37) yang menyatakan bahwa proses sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politiknya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan beberapa ilmuwan politik di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa dalam proses sosialisasi politik tersangkut beberapa hal yang harus dipenuhi. Hal tersebut adalah bahwa dalam proses sosialisasi politik harus ada *siapa* yang menyampaikan *apa*, dan ditujukan kepada *siapa* dengan *cara* yang bagaimana. Ringkasnya dalam proses sosialisasi politik terkandung beberapa hal, yaitu (1) adanya agen sosialisasi politik yang berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan materi sosialisasi ; (2) menyangkut materi yang merupakan bahan atau objek yang disosialisasikan ; (3) menyangkut individu yang merupakan pihak yang terkena sosialisasi ; (4) metode atau cara melakukan sosialisasi ; dan (5) proses interaksi penerimaan.

Sosialisasi politik selanjutnya diharapkan akan membentuk pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai fenomena politik. Adanya preferensi individu

terhadap fenomena politik dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan tujuan sosialisasi politik yaitu membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan menyadarkan individu akan peranannya sebagai partisipan dalam politik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irish dan Frank (1978 : 150) berikut ini :

*“process where individual members of a state acquire their feelings and behavioral attitudes about government and politics generally, their sense of national identification, loyalty to their government, allegiance to the leadership, and their understanding of roles they expect (or are expected) to play as participants in the political system ....”*

Dengan tujuannya yang seperti itu, maka sosialisasi politik akan mampu membangun pengetahuan, sikap dan penilaian seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi. Hal ini selanjutnya akan mendorong seseorang untuk menentukan preferensi politiknya dalam hal ini perilaku memilih dalam pemilu.

Pemahaman politik dapat dicermati antara lain melalui tingkat pemahaman terhadap hak-hak politik, frekuensi individu membicarakan masalah-masalah politik, tingkat ketertarikan individu terhadap masalah-masalah politik, respon individu terhadap peristiwa politik sehari-hari dan sebagainya.

## ***2. Identifikasi Kepartaian***

Identifikasi kepartaian adalah salah satu konsep penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Pentingnya identifikasi kepartaian sebagai variabel penjelas perilaku memilih pada awalnya dikemukakan oleh Campbell dan koleganya, peneliti kelompok Universitas Michigan.

324.642  
SUR  
P①

580/K/2004-j. (CI)

Menurut Campbell dan koleganya, identifikasi kepartaian adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologis tanpa pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk mendukung suatu partai (Gaffar, 1992 : 8). Identifikasi kepartaian itu sudah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa dewasa. Peranan identifikasi partai mungkin menurun atau kurang signifikan untuk menjelaskan perilaku memilih apabila faktor isu dan kandidat lebih dominan. Tetapi manakala individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan sangat kuat (Gaffar, 1992 : 8).

Penelitian tentang perilaku memilih di Indonesia juga pernah menggunakan konsep identifikasi kepartaian sebagaimana yang dilakukan Afan Gaffar dalam penelitiannya di desa Brobanti Yogyakarta. Ia menemukan adanya indikasi kuat antara identifikasi partai dengan perilaku memilih pada pemilu tahun 1982. Responden yang mengidentifikasi diri secara kuat dengan partai Islam akan memberikan suara pada partai Islam (PPP) dan responden yang memiliki identifikasi yang kuat terhadap partai non Islam akan memberikan suara pada partai non Islam yaitu Golkar dan PDI. Sedangkan responden yang memiliki identifikasi kepartaian yang lemah, maka kesetiaan partainya cenderung mengalami perubahan. Hampir 2/3 dari responden yang memiliki identifikasi yang lemah terhadap partai Islam memberikan suara pada Golkar pada pemilu 1982 (Gaffar, 1992 : 124).

Selanjutnya Kristiadi dalam penelitiannya tentang perilaku memilih di Kecamatan Keraton Yogyakarta dan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara juga menggunakan konsep identifikasi kepartaian. Baik di Kecamatan Keraton Yogyakarta maupun Kecamatan Sigaluh terdapat hubungan yang signifikan antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Responden yang mengidentifikasi diri dengan PPP pada umumnya memilih partai tersebut pada pemilu, begitu pula halnya dengan yang mengidentifikasi diri dengan Golkar atau PDI juga akan memilih partai tersebut pada pemilu (Kristiadi, 1993 : 464).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

- (1) identifikasi kepartaian adalah orientasi dan sikap yang dimiliki seseorang atau anggota masyarakat sehingga mereka merasa dekat dengan partai atau organisasi politik tertentu ;
- (2) identifikasi kepartaian diperoleh melalui proses yang lama sejak masa kanak-kanak dan berkembang terus sampai dewasa ;
- (3) walaupun identifikasi kepartaian bisa menguat dan melemah pada seseorang namun konsep ini tetap relevan untuk menjelaskan perilaku memilih karena identifikasi kepartaian sudah terbentuk sejak dini dalam kehidupan seseorang.

Dengan demikian identifikasi kepartaian dalam penelitian ini dideteksi melalui derajat simpati atau keterikatan secara psikologis seseorang kepada partai tertentu dan derajat fanatisme seseorang terhadap partai tersebut.

### III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Seberapa signifikan pemahaman terhadap politik dan identifikasi kepartaian secara simultan menentukan perilaku-memilih wanita pada pemilu 1999 di Kota Padang.
2. Faktor determinan manakah yang sangat berpengaruh terhadap perilaku-memilih wanita pada pemilu 1999 di Kota Padang.
3. Terdapat-tidaknya perbedaan perilaku-memilih antara wanita dengan pria pada pemilu 1999 di Kota Padang.

#### B. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pusat kajian wanita untuk menyusun strategi dan pedoman kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik.
2. Para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik wanita sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.
3. Partai politik dalam rangka menyerap aspirasi wanita sehingga dapat menyusun *platform* politik yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dari wanita khususnya dan dinamika masyarakat pada umumnya.
4. Pengembangan kepustakaan/teori dalam ilmu politik khususnya tentang gender dan politik, terutama mengetahui perilaku-memilih wanita dalam pemilu.

## IV. METODE PENELITIAN

### A. Hakekat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Disebut *explanatory research* karena penelitian ini menguji seberapa signifikan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dan mana di antaranya variabel determinan yang paling berpengaruh. Disamping itu akan dilacak pula kemungkinan adanya perbedaan perilaku-memilih antara wanita dengan pria dalam even pemilu.

Untuk memahami fenomena yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan metode kuantitatif sebagai metode pokoknya dan metode kualitatif sebagai metode pendukungnya.

### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Padang pada pemilu 1999 dengan jumlah 204.395 orang (PPD Sumatera Barat, 1999). Mengingat besarnya populasi, maka sampel penelitian ini ditetapkan sebesar 200 orang wanita. Sementara itu pengambilan sampel dilakukan dengan cara *proporsional random sampling*. Artinya besarnya sampel untuk setiap wilayah penelitian sangat ditentukan oleh besarnya populasi pada wilayah tersebut. Disamping itu untuk mengungkapkan terdapat-tidaknya perbedaan perilaku-memilih

antara pria dengan wanita, maka penelitian ini juga akan menjadikan 100 orang pria sebagai sampel penelitian.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dari responden berhubungan dengan pemahaman politik, identifikasi kepartaian serta perilaku memilih. Disamping itu juga data sekunder mengenai jumlah pemilih serta hasil pemilu 1999 yang diperoleh dari PPD Kota Padang.

### **D. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket (kuesioner) serta studi dokumenter.

### **E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi empiris, sehingga analisisnya memerlukan data lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diupayakan agar instrumen penelitian mempunyai validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu dilakukan *pre-testing* terhadap angket/kuesioner tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah pertanyaan tersebut dapat dimengerti responden sesuai dengan maksud dan isi pertanyaan itu.

Selanjutnya hasil *pre-testing* digunakan sebagai bahan penyempurnaan instrumen penelitian. Langkah berikutnya melakukan uji statistik terhadap instrumen penelitian dengan cara membuat korelasi antar item (*inter item correlation*) dengan



menggunakan rumus *korelasi product moment* untuk mengetahui konsistensi internal (*internal consistency*) dari item-item pertanyaan tersebut. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama (Djamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984 : 139).

Sementara itu untuk memperoleh reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan teknik belah dua (*split half method*), yaitu membagi item daftar pertanyaan ke dalam bagian yang sama besarnya dengan cara memisahkan item bernomor ganjil dan item bernomor genap. Item yang bernomor ganjil dikorelasikan dengan item yang bernomor genap. Hasil korelasi tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus berikut :

$$r. \text{ tot} = \frac{2(r. \text{ tt})}{1 + r. \text{ tt}}$$

dimana :

r. tot = angka reliabilitas keseluruhan item.  
r. tt = angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua  
(Djamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984 : 144).

Bila  $r. \text{ tot} > r. \text{ tt}$  maka tingkat reliabilitas dapat dicapai.

Sehubungan dengan pengujian reliabilitas instrumen penelitian, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa  $r. \text{ tot} (.72) > r. \text{ tt} (.56)$ . Jadi instrumen penelitian memenuhi syarat reliabilitas.

## F. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan pengujian hipotesis dan analisa dalam penelitian ini digunakan metode statistik multi regresi (regresi berganda). Multi regresi merupakan unsur dasar dalam kebanyakan metode-metode multi-variat lainnya yang memungkinkan ilmuwan behavioral menyelami fenomena secara lebih mendalam dan realistis (Kerlinger, 1993 : 928). Di samping itu ia penuh guna dan praktis : ia melakukan tugas analisisnya secara berhasil dan efisien. Ia dapat memberitahukan berapa besarkah bagian Y yang dapat diduga sebagai disebabkan oleh  $X_1, X_2, \dots, X_k$ . Selanjutnya, ia memberikan gagasan tertentu tentang besar-relatif pengaruh-pengaruh X secara terpisah. Pendek kata, analisis multi regresi merupakan suatu teknik pengujian hipotesis dan pembuatan inferensi yang efisien serta kuat, karena membantu ilmuwan untuk mengkaji - dengan ketepatan relatif - interelasi-interelasi rumit antara variabel-variabel bebas dan suatu variabel terikat, dan dengan demikian membantu para ilmuwan “menjelaskan” fenomena yang diduga tercerminkan oleh variabel-variabel terikat itu (Kerlinger, 1993 : 966-967).

Analisis lain yang juga akan dilakukan adalah analisis *different of means test* serta analisis korelasi parsial. *Different of mens test* digunakan untuk melacak terdapat-tidaknya perbedaan antara perilaku-memilih perempuan dengan laki-laki pada pemilu 1999 di Kota Padang. Temuan ini untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan *analisis jender*. Sementara itu analisis korelasi parsial untuk melacak apakah hubungan yang terjadi antar variabel merupakan hubungan yang murni atau

hanya kebetulan (semu). Semua perhitungan dilakukan dengan menggunakan komputer (*program SPSS/PC+*).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan temuan penelitian dan sekaligus analisis data yang telah dikumpulkan. Terdapat empat hal pokok yang akan dibahas. *Pertama*, pendeskripsian tentang : (1) pemahaman politik; (2) identifikasi kepartaian ; serta (3) perilaku memilih dari responden beserta kecenderungan gejala-gejala yang diamati. *Kedua*, analisis variabel penelitian yang menggambarkan bagaimana pengaruh pemahaman politik serta identifikasi kepartaian terhadap perilaku pemilih perempuan dalam pemilu. *Ketiga*, melacak ada-tidaknya perbedaan antara perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki dalam pemilu. *Keempat*, pengujian hipotesis.

### A. Pemahaman Politik

Pemahaman politik berhubungan dengan aspek kognisi, afeksi dan evaluasi terhadap realitas politik yang ada. Oleh karena itu pemahaman politik akan berimplikasi terhadap kesadaran seseorang untuk menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh kontestan pemilu.

Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali pemahaman politiknya dikelompokkan ke dalam 11 tema berikut : (1) pemahaman tentang peranan Lembaga Perwakilan Rakyat ; (2) pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan MPR dan DPR dari segi struktur dan fungsinya ; (3) pengetahuan tentang prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan; (4) pemahaman tentang kekuasaan kepresidenan ; (5) pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara ; (6) pengetahuan tentang perbedaan

pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara ; (7) pengetahuan tentang pelayanan yang diberikan pegawai pemerintah (birokrasi) terhadap warga negara ; (8) pemahaman tentang partai politik dan peran partai politik ; (9) pemahaman tentang pelaksanaan pemilu ; (10) pemahaman tentang kebebasan pers; dan (11) pemahaman tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengadakan demonstrasi.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan pada kategori kualitatif sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), kurang (K). Adapun penyebaran jawaban responden secara lengkap dapat dicermati melalui tabel berikut ini.

Tabel 3 : Pemahaman Politik Responden

No.	Pemahaman Berdasarkan Tema		Kategori Jawaban			
			SB (%)	B (%)	CB (%)	K (%)
1.	Peranan Lembaga Perwakilan Rakyat	MPR	36	20	14	30
		DPR	40	14	20	26
2.	Perbedaan dan persamaan MPR dengan DPR	Struktur	10	12	8	70
		Fungsinya	6	12	4	78
3.	Rekrutmen anggota Dewan	Cara pengisian	12	10	8	70
		Prinsip keterwakilan	78	12	8	2
4.	Kekuasaan kepresidenan		80	14	6	0
5.	Pemahaman hak dan kewajiban dalam bernegara	Pengertian	20	14	6	60
		Pelaksanaan	10	12	8	70
6.	Pelayanan birokrasi		78	14	8	0
7.	Pemahaman partai politik	Pengertian	2	6	20	72
		Kompetisi parpol	60	16	22	2
8.	Pengetahuan tentang pemilu	Pelaksanaan	86	14	0	0
9.	Pemahaman kebebasan berekspresi	Kebebasan pers	20	16	4	60
		Berserikat /berkumpul	26	8	2	64

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pemahaman politik perempuan masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Namun secara khusus atau pada

tema-tema tertentu terutama yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan seputar suasana kepolitikan secara “riil politik”, pemahaman politiknya bisa digolongkan sangat baik. Hal ini bisa dicermati melalui jawaban responden terhadap pertanyaan seputar kekuasaan kepresidenan. Dalam konteks ini terlihat 80% responden tergolong sangat baik pemahamannya terhadap corak kekuasaan kepresidenan, lalu 14% tergolong baik. Sementara hanya 6% dari responden yang tergolong kurang. Dari data ini terlihat jelas pandangan responden terhadap pelaksanaan kekuasaan kepresidenan yang jauh mengalami perubahan pasca kejatuhan Soeharto.

Pencermatan lebih lanjut dari jawaban responden yang sangat baik pada tema-tema sebagai berikut : (1) prinsip keterwakilan pada rekrutmen anggota dewan ; (2) pelayanan birokrasi ; (3) penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat pemilu ; (4) pemahaman kompetisi antar partai politik. Keempat tema ini ditambah tema tentang kekuasaan kepresidenan merupakan tema yang tampaknya sangat dipahami responden. Dengan begitu untuk suasana riil politik sehari-hari sebagian besar responden menguasai dan melek politik.

Untuk lebih dalam dapat dicermati jawaban responden pada tema-tema tersebut. Tema yang menyangkut prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan dijawab oleh 78% responden dengan pendeskripsian jawaban yang tergolong sangat baik. Dengan kata lain kebanyakan responden memahami bahwa dalam merekrut anggota dewan era reformasi telah terjadi pergeseran yang sangat berarti dari cara-cara kolusi dan nepotisme kepada keinginan rakyat. Sementara penyebaran jawaban lainnya dikategorikan 12% baik, 8% cukup baik dan 2% yang

kurang. Demikian pula untuk tema pelayanan birokrasi dengan distribusi jawaban responden adalah 78% sangat baik dan 14% baik. Fakta ini menunjukkan bahwa sebanyak 92% responden memahami betul kenyataan pelayanan birokrasi atau aparat pemerintah bila berhadapan dengan masyarakat umum. Sudah bukan rahasia lagi bahwa birokrasi di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah dirasakan sangat berbelit-belit. Pendeskripsian jawaban responden juga disertai contoh-contoh kongkrit bagaimana pelayanan yang mereka rasakan bila bersentuhan dengan kebijakan politik ataupun aparat birokrasi yang melakukan pelayanan publik.

Hal senada ditemukan pada jawaban responden pada tema seputar pemilu. Pada penyebaran jawaban responden terhadap kompetisi partai politik peserta pemilu terlihat bahwa 60% responden berada dalam kategori sangat baik, 16% baik. Ini berarti 76% dari responden mampu mendeskripsikan suasana kehidupan kepartaian saat ini, terutama pada masa-masa pemilu dimana masing-masing partai berkompetisi relatif secara adil dan fair. Sementara itu pemahaman responden tentang pelaksanaan pemilu pada masa ini memperlihatkan bahwa 86% menjawab dengan apa adanya kondisi riil pelaksanaan pemilu 1999 yang dapat dikatakan berlangsung lebih demokratis jika dibandingkan era Orde Baru. Sisa penyebaran jawaban responden untuk tema ini adalah 14% baik dan tak satupun yang cukup baik apalagi kurang paham sama sekali.

Dari uraian lima tema yang sangat kental dengan nuansa kepolitikan riil yang dilaksanakan sehari-hari terlihat kenyataan positif pemahaman responden. Bisa jadi realitas pemahaman responden antara lain disebabkan oleh karena bergulirnya

reformasi politik yang telah mewujudkan transparansi informasi tentang segala kenyataan yang terjadi pada sistem politik. Artinya masyarakat dapat mengakses berita tentang dinamika dan proses politik yang tengah terjadi melalui berbagai media informasi.

Walaupun lima tema dari pemahaman politik sebelumnya dikategorikan pada pemahaman yang sangat positif, namun bila dicermati lagi tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pemahaman politik perempuan adalah masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Kenyataan ini dapat dideteksi dari jumlah jawaban responden yang terbanyak pada kategori cukup baik dan kurang. Terutama sekali pada sebagian besar tema-tema yang menyangkut pengetahuan dasar politik dan pengetahuan tentang menjadi warga negara yang baik. Tema tentang pengetahuan dasar politik seperti perbedaan dan persamaan antara MPR dengan DPR, baik pada sub tema struktur maupun fungsi terlihat lebih 78% responden tergolong cukup baik dan kurang paham sama sekali. Demikian juga tentang sub tema cara pengisian keanggotaan MPR dan DPR lebih dari 82% responden menjawab pertanyaan dengan pendeskripsian pada kategori cukup baik dan tidak kurang paham.

Kenyataan lain yang turut mendukung bukti dangkalnya pemahaman pengetahuan dasar responden ini adalah dalam tema hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara sebagai wujud warga negara yang baik. Ini dibagi ke dalam dua sub tema yaitu pengertian hak dan kewajiban serta perincian hak dan kewajiban bernegara yang dimiliki oleh seorang WNI. Kedua pertanyaan di arahkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.



Dari dua sub tema ini ditemui jawaban responden 60 – 70% pada kategori kurang paham sama sekali.

Pemahaman akan hak dan kewajiban ini sebenarnya menarik untuk diperhatikan. Selama ini setiap individu di Indonesia tidak menempati posisi sebagai warga negara secara utuh melainkan sebagai warga masyarakat yang dihadapkan dengan negara, rakyat yang dihadapkan pada penguasa atau massa yang dihadapkan pada elit. Sebagai warga masyarakat, setiap individu memulai dan mengakhiri hidupnya di dalam batas-batas dan kontrol negara. Setiap individu, sebagai bagian dari rakyat, digambarkan orang kebanyakan yang bodoh, miskin, rakus, tidak beradab, dan sebagainya, sehingga harus selalu dibina oleh pemerintah. Mereka harus selalu patuh pada pemerintah. Di tempat lain, rakyat selalu dimanipulasi oleh berbagai komponen bangsa bahwa mereka bertindak atas nama rakyat. Setiap pejabat akan selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat banyak, meski mereka menindas banyak individu yang termasuk dalam bagian rakyat. Sebagai bagian dari massa, setiap individu adalah barang mainan yang selalu dimanipulasi oleh para elite politik untuk kepentingan politik mereka. Massa digambarkan sebagai kerumunan anarkhis yang mudah menimbulkan keributan.

Karena itu, secara substansial setiap individu selama ini lebih mengenal kewajibannya daripada hak-haknya sebagai warga negara. Demikian juga dengan para responden penelitian yang mengaku paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena menggunakan rujukan konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi itu secara normatif ditegaskan akan hak-hak politik, sosial dan ekonomi warga negara.

Tetapi pengetahuan mereka akan hak-hak itu tidak ditransformasikan menjadi bentuk perjuangan untuk menegakkan hak-hak warga negara yang selama ini hilang karena ditindas oleh negara.

Dangkalnya pemahaman politik responden juga terlihat pada jawabannya terhadap tema-tema tentang pengertian dan fungsi partai politik. Hanya 2% responden yang dapat dikatakan mempunyai pengetahuan positif tentang hal ini, selebihnya terdistribusi pada baik (6%), cukup baik (20%) dan kurang paham sama sekali (72%). Artinya tingkat pemahamannya dalam konteks ini dapat dikatakan dangkal atau sangat dangkal. Demikian juga pemahaman responden tentang kebebasan berekspresi. Hanya 20 – 26% responden yang sadar betul aktivitas kebebasan berekspresi, sementara 60 – 64% masih tergolong pada kategori kurang paham sama sekali.

Dari tema-tema yang dipertanyakan untuk menjaring pemahaman politik ini, hanya tema peranan lembaga perwakilan dengan dua sub temanya yaitu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai jawaban dengan penyebaran agak bervariasi. Pada sub tema peranan MPR ini terlihat responden cukup banyak yang mengetahui/mampu menjelaskan, 36% sangat baik dan 20% baik serta 14% cukup baik dan sisanya 30% kurang paham sama sekali. Sedangkan untuk sub tema peranan DPR juga terlihat fenomena yang sama, 40% sangat baik dan 14% baik serta 20% cukup baik dan 26% kurang paham sama sekali. Dari kenyataan ini jelas bahwa lebih dari 50% responden mampu menjawab dengan memperlihatkan tingkat pengetahuan yang cukup positif.

Sepanjang data yang diungkapkan di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pemahaman politik perempuan adalah masih rendah atau tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam atau masih rendahnya pemahaman politik perempuan terjaring melalui tema-tema yang menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar kepolitikan yang ada dalam suatu sistem politik. Namun pada beberapa tema yang memiliki kekhususan nuansa kepolitikan riil (lima tema), dipahami dengan sangat baik oleh responden, terutama tentang kekuasaan kepresidenan, pelayanan birokrasi, prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan, pelaksanaan pemilu sampai pada pemahaman responden terhadap ruang kompetisi antar partai politik. Pemahaman yang positif terhadap hal ini ditunjang oleh semakin terbukanya kran kebebasan informasi yang diusung oleh dunia pers pasca kejatuhan rezim Soeharto.

Beranjak dari penelusuran pemahaman responden dalam tema-tema yang dirangkum dalam tabel ... sebelumnya, maka dapatlah diklasifikasikan bagaimana sesungguhnya tingkat pemahaman politik responden. Hal ini bisa diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Pemahaman Politik

No.	Tingkat Pemahaman	Jumlah
1.	Sangat baik	3 (1,5%)
2.	Baik	18 (9%)
3.	Cukup baik	138 (69%)
4.	Kurang	41 (20,5%)
5.	Kurang sekali	0 (0%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Mengacu kepada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden (69%) hanya memiliki pemahaman politik pada derajat cukup baik, disusul

kurang 20,5% responden, 9% yang pemahaman politiknya baik dan hanya 1,5% saja yang sangat baik. Kondisi ini diyakini akan berimplikasi pada preferensi politiknya dalam pemilu 1999.

Akan tetapi pemahaman politik sebenarnya tidak selalu membangun konfidensi individu terhadap lembaga-lembaga politik maupun budaya demokratis. Sekalipun seseorang memahami betul tentang sistem politik, pemilihan umum dan demokrasi, tetapi tidak jarang di antara mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Ketidakpercayaan bisa merupakan pantulan dari sikap kritis tetapi juga bisa merupakan sikap yang pesimis atau bahkan apatis terhadap lembaga-lembaga politik. Bagaimanapun juga mekanisme dan lembaga-lembaga demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik apabila memperoleh masukan (input) dari masyarakat, baik yang berbentuk *demand* (kritik, tuntutan, kontrol) maupun *support* (kepercayaan, kepedulian, dukungan). Input *demand* selalu dibutuhkan untuk mengontrol dan memelihara agar pemerintahan selalu berasal “dari” rakyat, ditentukan “oleh” rakyat dan dimanfaatkan kembali “untuk” rakyat. Kalau tidak ada *demand* yang kuat dari masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak bakal berjalan dengan baik. Pemerintahan akan cenderung otoriter, korup, dan menindas rakyat banyak. Pengalaman buruk yang terjadi selama puluhan tahun Orde Baru sebenarnya memberi petunjuk betapa lemahnya *demand* dan *support* dari masyarakat, meskipun masyarakat sudah mempunyai pemahaman politik yang baik bahwa kinerja pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

## **B. Identifikasi Kepartaian**

Identifikasi kepartaian merupakan faktor yang berperan dalam menentukan perilaku politik dalam pemilu. Ia dapat dikatakan sebagai kombinasi perasaan dan



sikap yang berwujud simpati terhadap partai politik. Jadi dalam konteks ini yang terbangun pada diri individu adalah kedekatan emosional yang tidak terikat pada formalitas administrasi. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, identifikasi partai mempunyai dua makna sekaligus. *Pertama*, adalah keterikatan seseorang pada partai tertentu. Orang misalnya akan mengidentifikasi dirinya pendukung Partai Keadilan (PK) atau Paratai Amanat Nasional (PAN) sementara yang lain mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan yang lainnya lagi mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). *Kedua*, sikap, derajat dukungan atau kerikatan secara psikologis seseorang pada partai yang ia identifikasi, yang kemudian diukur dengan skala interval. Di sini akan diketahui apakah keterikatan dan dukungan seseorang pada salah satu partai – entah PK, PAN, PPP atau PDI-P -- itu kuat atau lemah.

Gambaran tentang identifikasi kepartaian kategori pertama dapat dilihat penampilan tabel 5. Tabel ini memperlihatkan bahwa di kalangan perempuan Kota Padang, PAN serta PPP lebih populer dibandingkan partai politik lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden sejumlah 98 (49%) menyatakan bahwa partai yang dirasakan paling dekat adalah PAN dan PPP sebesar 54 (27%). Sementara itu Golkar yang selama Orde Baru mendominasi pemilu ternyata hanya sejumlah 26 (13%) responden yang merasa dekat dengan partai ini. Sedangkan sisanya 12 (6%) responden menyatakan kedekatannya dengan PDI-P serta 10 (5%) PK. Jadi selain kelima partai ini di kalangan perempuan Kota Padang dapat dikatakan kurang populer. Ketidakpopuleran partai barangkali karena disebabkan karena kurangnya sosialisasi partai saat menghadapi pemilu apalagi perempuan selama ini juga termarginalisasi dari kehidupan dan proses politik itu sendiri.

Tabel 5 : Distribusi Responden Menurut Identifikasi Kepartaian

No.	Parta yang dirasa paling dekat	Jumlah
1.	PAN	98 (49%)
2.	PPP	54 (27%)
3.	Golkar	26 (13%)
4.	PDI-Perjuangan	12 (6%)
5.	PK	10 (5%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Selanjutnya bagaimana sikap responden terhadap partai yang dirasakan dekat dengan dirinya? Tabel 6 berikut ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini.

Tabel 6 : Distribusi Responden Menurut Sikap Terhadap Partai Yang Dirasa Paling Dekat

No.	Sikap Terhadap Partai	Jumlah
1.	sangat simpati	28 (14%)
2.	simpati	29 (14,5%)
3.	cukup simpati	112 (56%)
4.	tidak simpati	31 (15,5%)
5.	sangat tidak simpati	0 (0%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Sikap reponden sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di atas terhadap partai yang dirasakannya paling dekat didominasi oleh cukup simpati (56%), disusul kemudian tidak simpati (15,5%) dan simpati serta sangat simpati proporsinya berimbang (14,5% dan 14%). Dengan demikian tidak satupun dari responden yang bersikap antipati terhadap partainya.

Sikap yang ditunjukkan responden ini tentunya akan berimplikasi terhadap perilakunya dalam menghadapi pelecehan terhadap partainya. Dalam hubungan ini dapat dicermati tabel 7.

**Tabel 7**  
**Reaksi Responden Terhadap Pelecehan Pada Partainya**

<b>No.</b>	<b>Bentuk Reaksi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sangat tersinggung dan bereaksi secara fisik	0 (0%)
2.	Sangat tersinggung dan memberikan teguran	18 (9%)
3.	Tersinggung dan memendamnya dalam hati	15 (7,5%)
4.	Biasa-biasa saja	122 (61%)
5.	Tidak peduli	45 (22,5%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Gambaran reaksi responden terhadap pelecehan pada partainya sebagaimana diungkapkan tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan biasa-biasa saja dan tidak peduli atas pelecehan yang terjadi terhadap partai pilihannya, proporsinya masing-masing 61% dan 22,5%. Hanya 9% di antaranya yang merasa sangat tersinggung dan memberikan teguran serta 7,5% saja yang tersinggung dan memendamnya dalam hati. Jika sikap dan wujud perilaku responden dianggap sebagai dukungan terhadap partainya yang diklasifikasikan atas dukungan yang kuat, sedang dan lemah maka distribusi responden menurut tingkat dukungannya terhadap partai dapat dicermati melalui tabel berikut.

**Tabel 8**  
**Distribusi Responden Menurut Tingkat Dukungan Terhadap Partai**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Dukungan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kuat	9%
2.	Cukup kuat	7%
3.	Lemah	84%
<b>Jumlah Total</b>		<b>100%</b>

Temuan empiris sebagaimana ditunjukkan tabel 8 memberikan penjelasan bahwa mayoritas responden (50%) memberikan tingkat dukungan yang lemah terhadap partainya. Sementara itu yang lainnya, 36,5% responden dukungannya cukup kuat, 10% lemah sekali dan hanya 3,5% saja yang dukungannya kuat dan tak satu pun

responden yang memiliki dukungan sangat kuat terhadap partai pilihannya. Apakah argumen responden untuk memberikan dukungan terhadap PAN, PK, PPP, Golkar atau PDI-Perjuangan? Jawabannya dapat ditemukan berdasarkan uraian berikut.

Tabel 9  
Alasan Responden Mengidentifikasi Diri dengan Partai Pilihannya

No.	Alasan	SSS	SS	S	TS	STS	Jml.
1.	Karena partai tersebut yang paling Saudara segani	28 (14%)	33 (16,5%)	59 (29,5%)	48 (24%)	32 (16%)	200 (100%)
2.	Karena partai tersebut hendak memperjuangkan nasib umat Islam.	35 (17,5%)	32 (16%)	56 (28%)	40 (20%)	37 (18,5%)	200 (100%)
3.	Karena partai tersebut sesuai dengan agama yang Saudara anut	37 (18,5%)	31 (15,5%)	49 (24,5%)	39 (19,5%)	44 (22%)	200 (100%)
4.	Karena partai tersebut sesuai dengan aspirasi Saudara	62 (31%)	38 (19%)	49 (24,5%)	27 (13,5%)	24 (12%)	200 (100%)
5.	Karena partai tersebut adalah pilihan orang tua Saudara			40 (20%)	75 (37,5%)	85 (42,5%)	200 (100%)
6.	Karena partai tersebut adalah pilihan tokoh panutan Saudara		30 (15%)	36 (18%)	54 (27%)	80 (40%)	200 (100%)
7.	Karena partai tersebut adalah pilihan atasan Saudara			41 (22,5%)	78 (39%)	81 (40,5%)	200 (100%)
8.	Karena Saudara memperoleh pendidikan di lingkungan yang sudah dekat dengan partai tersebut	24 (12%)	37 (18,5%)	35 (17,5%)	57 (28,5%)	47 (23,5%)	200 (100%)
9.	Karena Saudara menjadi pengurus partai tersebut			36 (18%)	73 (36,5%)	91 (45,5%)	200 (100%)
10.	Karena teman dekat Saudara adalah pengurus partai tersebut			42 (21%)	94 (47%)	64 (32%)	200 (100%)
11.	Karena Saudara sering terlibat dalam kegiatan partai tersebut	30 (15%)	45 (22,5%)	61 (30,5%)	31 (15,5%)	34 (17%)	200 (100%)



Berdasarkan data empiris yang ada pada tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat lima alasan mengapa responden mengidentifikasi diri dengan partai pilihannya. Kelima alasan tersebut sebagai berikut : *Pertama*, partai tersebut adalah partai yang disegani (60%). *Kedua*, partai tersebut merupakan partai yang akan memperjuangkan nasib umat Islam (61,5%). *Ketiga*, partai tersebut sebagai partai yang memiliki kesesuaian dengan agama yang dianut (58,5%). *Keempat*, partai tersebut sesuai dengan aspirasi (74,5%). Alasan terakhir, yang *kelima* adalah sering terlibat dalam kegiatan partai tersebut (67,5%).

Penjelajahan terhadap berbagai gejala yang dikemukakan sebelumnya pada akhirnya menunjukkan derajat identifikasi kepartaian daripada responden sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini.

**Tabel 10**  
**Distribusi Responden Menurut Derajat Identifikasi Kepartaian**

<b>No.</b>	<b>Derajat Identifikasi Kepartaian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sangat kuat	0 (0%)
2.	Kuat	7 (3,5%)
3.	Cukup kuat	73 (36,5%)
4.	Lemah	100 (50%)
5.	Lemah sekali	20 (10%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Tabel 10 memperlihatkan kepada kita bahwa identifikasi kepartaian responden sebagian besar berada pada derajat yang lemah yaitu sejumlah 100 responden (50%), cukup kuat 36,5%, lemah sekali 10% dan hanya 3,% saja yang identifikasi kepartaiannya yang kuat serta tak satu pun yang identifikasi kepartaian atau ikatan psikologisnya dengan partai sangat kuat. Realitas ini menjadi pemilih perempuan sangat gampang untuk dimobilisasi dalam pemilu.

### C. Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan refleksi identifikasi kepartaian yang bermuara kepada preferensi politik individu memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilu. Disamping itu perilaku memilih akan teraktualisasi dalam bentuk aktivitas individu mendukung partainya. Dalam konteks ini partai politik apa yang menjadi pilihan responden dalam pemilu 1999 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11  
Distribusi Responden Menurut Partai Pilihan Pada Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Jumlah
1.	PAN	98 (49%)
2.	PPP	54 (27%)
3.	Golkar	26 (13%)
4.	PDI-Perjuangan	12 (6%)
5.	Partai Keadilan	10 (5%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100 %)</b>

Tabel 11 memberikan penjelasan bahwa bagian terbesar dari responden (49%) memilih PAN dalam pemilu 1999. Kemudian disusul oleh PPP sejumlah 27%, Golkar 13%, sedangkan sisanya diraup oleh PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan dengan proporsi yang berimbang, masing-masing 6% dan 5%. Temuan ini memberi ketegasan bahwa hanya lima partai ini yang meraih dukungan pemilih perempuan di Kota Padang di antara 48 kompetitor pemilu 1999.

Apakah yang menjadi faktor penentu dari pilihan responden dalam pemilu 1999? Pertanyaan kritis ini sebenarnya bisa dijadikan basis untuk mengidentifikasi antara tipe pemilih rasional-otonom dengan pemilih tradisional-mobilisasi. Pemilih rasional-otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena didasari oleh pertimbangan dan kesadaran sendiri, misalnya dengan memperhatikan program-program partai. Sebaliknya pemilih tradisional-mobilisasi

adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh orang lain, dan tidak peduli akan pertimbangan rasional seperti program partai.

Tabel 12 memberi gambaran yang gamblang tentang dua tipe pemilih itu. Dalam tabel itu terlihat sebesar 29% responden tergolong sebagai pemilih rasional-otonom, karena memilih atas dasar pertimbangan sendiri. Mereka menentukan pilihannya relatif kebal (*immune*) terhadap intervensi, tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Sisanya, 71% responden tergolong dalam kategori pemilih tradisional-mobilisasi. Di antara mereka ada yang mengikuti saran dari keluarga 23% dan pengaruh lingkungan bekerja 14,5%. Selanjutnya pengaruh teman sejawat dan tekanan pihak lain nampak berimbang yaitu 12% dan 11,5%.

Tabel 12  
Distribusi Responden Menurut Faktor Penentu Pilihan Partai  
Pada Pemilu 1999

No.	Faktor Penentu	Jumlah
1.	Pertimbangan sendiri	58 (29%)
2.	Saran dari keluarga	46 (23%)
3.	Pengaruh teman sejawat	24 (12%)
4.	Pengaruh lingkungan bekerja	29 (14,5%)
5.	Dimobilisir (tekanan) pihak lain	23 (11,5%)
	<b>Jumlah Total</b>	<b>200 (100%)</b>

Sehubungan dengan hal ini, indikasi bahwa pemilih perempuan merupakan segmen pemilih yang sangat gampang untuk dimobilisasi merupakan suatu keniscayaan. Diyakini kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pemahaman politik yang dimiliki serta teralienasinya mereka dalam proses politik itu sendiri.

Setelah menganalisis variabel perilaku memilih pada skala nominal di atas, penyusun akan menganalisis variabel itu pada skala interval, yaitu melacak sejauh mana tingkat aktivitas atau dukungan fisik responden pada partai yang mereka pilih

masing-masing. Tabel 13 misalnya menggambarkan bentuk dan derajat aktivitas responden dalam mendukung partainya.

Tabel 13  
Bentuk Aktivitas Responden  
dan Derajatnya dalam Mendukung Partai Pilihannya

No.	Bentuk Aktivitas	Derajat Aktivitas					Jumlah
		sangat aktif	aktif	cukup aktif	tidak aktif	sangat tidak aktif	
1.	Mengikuti pawai dalam kampanye	12 (6%)	16 (8%)	94 (47%)	64 (32%)	14 (7%)	200 (100%)
2.	Mengajak orang lain mengikuti kampanye partai yang didukung	10 (5%)	12 (6%)	69 (34,5%)	56 (28%)	53 (26,5%)	200 (100%)
3.	Memasang tanda gambar partai, spanduk dan lainlain	11 (5,5%)	19 (9,5%)	72 (36%)	63 (31,5%)	35 (17,5%)	200 (100%)
4.	Mengajak orang lain memilih partai yang didukung	5 (2,5%)	6 (3%)	30 (15%)	103 (51,5%)	56 (28%)	200 (100%)
5.	Mengikuti temu kader atau pengarahan pengurus partai	8 (4%)	15 (7,5%)	109 (54,5%)	29 (14,5%)	39 (19,5%)	200 (100%)

Jika derajat aktivitas dukungan responden ditransformasikan kedalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah maka derajat aktivitas responden mengikuti pawai dalam kampanye umumnya sedang sebesar 47%, rendah 39% dan sisanya tinggi hanya 14% saja. Untuk aktivitas mengajak orang lain mengikuti kampanye partai yang didukung, penyebaran proporsinya masing-masing sebagai berikut rendah 54,5%, sedang 34,5% dan hanya 11% yang tinggi. Dalam hal memasang tanda gambar partai, spanduk dan lain-lain temuan menunjukkan bahwa mayoritas (49%) responden aktivitasnya rendah, 36% sedang dan sisanya 15% tinggi. Sementara itu dalam upaya mengajak orang lain untuk memilih partai yang didukung umumnya (79,5%) responden aktivitasnya rendah, 15% sedang dan 5,5% tinggi. Sedangkan untuk mengikuti temu kader atau pengarahan dari pengurus partai ternyata sebagian

besar responden (54,5%) aktivitasnya dalam kategori sedang, 34% sedang dan 11,5% lagi tinggi.

Dengan penelusuran terhadap aktivitas responden dalam mendukung partainya, maka dapat diklasifikasikan perilaku memilih responden seperti terlihat pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14  
Distribusi Responden Menurut Derajat Perilaku Memilih

No.	Derajat Perilaku Memilih	Jumlah
1.	Sangat aktif	0 (0%)
2.	Aktif	12 (6%)
3.	Cukup aktif	65 (32,5%)
4.	Tidak aktif	107 (53,5%)
5.	Sangat tidak aktif	16 (8%)
<b>Jumlah Total</b>		<b>200 (100%)</b>

Data yang ada pada tabel 14 memberikan gambaran bahwa umumnya (53,5%) responden perilaku memilihnya tidak aktif, cukup aktif 32,5%, sangat tidak aktif 8%. Dari keseluruhan responden hanya 6% saja yang aktif dan tak satu pun responden sangat aktif dalam hal mengaktualisasikan dukungannya terhadap partai. Hal ini berarti pemilih perempuan mempunyai kecenderungan berperilaku pasif dalam pemilu. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pemerintah beserta partai politik mampu mencari formula yang tepat untuk membangun keterampilan perempuan dalam melakukan berbagai aktifitas politik serta terlibat dalam proses dan dinamika politik itu sendiri.

#### D. Pengujian Hipotesis

Upaya untuk melakukan uji hipotesis penelitian diperoleh melalui analisis multi regresi. Analisis ini merupakan metode untuk mengkaji akibat-akibat dan besarnya akibat dari lebih satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Kerlinger, 1993 : 929). Jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Disamping itu analisis ini juga bermanfaat untuk menemukan kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat serta secara khusus menemukan variabel bebas apa yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Penelitian ini sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan tiga variabel bebas masing-masing pemahaman politik ( $X_1$ ), konsumsi media massa ( $X_2$ ) serta hubungan patron-klien ( $X_3$ ) dan satu variabel intervening yaitu identifikasi kepartaian ( $X_4$ ). Sedangkan variabel terikat adalah perilaku memilih ( $Y$ ) yaitu derajat aktivitas dukungan seseorang terhadap partai politik tertentu untuk selanjutnya memilih partai tersebut di dalam pemilu.

Jika kita cermati hasil pengolahan data (*correlation and regression*) dapat dikatakan bahwa model yang dibangun untuk memprediksi perilaku memilih merupakan model yang ideal dengan kata lain dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Beberapa hal yang mendukung kesimpulan ini adalah probabilitas persamaan regresi mencapai .000 dengan nilai standar kesalahan (*standard error*) estimasi adalah .5328. *Kedua*, model yang dibangun tidak menunjukkan adanya *multicollinearity* dimana F signifikan tetapi statistik t tidak signifikan serta  $R^2$  relatif besar tetapi statistik t tidak ada yang signifikan (Mulyono, 1991 : 226) .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan dikemukakan analisis multi regresi untuk menemukan pengaruh simultan dari pemahaman politik dan identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih. Selanjutnya hasil analisis yang dilakukan juga digunakan untuk menemukan besarnya kontribusi relatif dari masing-masing variabel dan variabel apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perilaku memilih.

Persamaan regresi yang terbentuk mengacu kepada pengolahan data adalah  $Y = .765 + .130 X_1 + .531 X_2$ . Sementara itu koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) yang dihasilkan = .258, artinya variasi variabel terikat (dalam hal ini perilaku memilih) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas pemahaman politik, konsumsi media massa, hubungan patron-klien serta identifikasi kepartaian sebesar 25,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 74,2% lagi perilaku memilih dijelaskan oleh variabel lainnya.

Kontribusi dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dapat dikatakan sangat signifikan. Hal ini berdasarkan kepada F ratio yang diperoleh = 35.511, jauh lebih besar dari F kritis ( $.01 ; 4 ; 195$ ) yang hanya 3.413. Temuan ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian *hipotesis* yang menyatakan *terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman politik dan identifikasi kepartaian secara simultan terhadap perilaku pemilih perempuan di Kota Padang pada pemilu 1999*. Beranjak dari kenyataan dimana F ratio > F kritis maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  sebagaimana yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Kemungkinan salah atas penolakan  $H_0$  sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas mencapai 0%.

Hal lain yang perlu dilacak adalah besarnya kontribusi relatif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan koefisien regresi (*Beta*) maka kontribusi dari variabel pemahaman politik (X1) 13% dan identifikasi kepartaian 53,1%. Kontribusi relatif ini memberi petunjuk bahwa identifikasi kepartaian memberikan pengaruh terbesar terhadap perilaku pemilih perempuan. Oleh karena itu *hipotesis kedua* dari penelitian ini yang menyatakan bahwa *identifikasi kepartaian merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan perilaku pemilih perempuan dapat diterima.*

Temuan ini semakin menegaskan bahwa identifikasi kepartaian merupakan determinan yang sangat penting dalam pembentukan perilaku memilih, di mana derajat aktivitas individu dalam memberikan dukungan terhadap partainya sangat ditentukan oleh seberapa besar derajat identifikasi kepartaianya. Hal ini sejalan dengan penegasan *Denver* (1989 : 27-28), bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai perasaan loyalitas (identifikasi kepartai) yang dibentuk oleh pengalaman atau sosialisasi sepanjang hidup. Kesimpulan *Denver* ini berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku memilih di Inggris, dimana selama seperempat abad sebagian besar pemilih memilih partai yang sama dari pemilu ke pemilu.

Selanjutnya pelacakan terhadap kemungkinan adanya perbedaan antara perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki sebagai jawaban dari hipotesis ketiga diperoleh dengan melakukan analisis *different of meant test*. Data menunjukkan bahwa *mean* perilaku pemilih perempuan (X1) adalah 2.472 dengan standar deviasi (SD) 0.618, sedangkan perilaku pemilih laki-laki *mean*-nya (X2) adalah 2.869 dan SD 0.81. Analisis ini menghasilkan nilai *t* hitung adalah 3.97, yang apabila dibandingkan dengan nilai *t* kritis (tabel) ternyata lebih besar ( $3,97 > 1.96$ ).



Berpijak atas hasil *different of mean test* yang dilakukan maka jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki sehingga hipotesis ketiga penelitian ini pun dapat diterima.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks pemilu misalnya, perempuan dapat saja memilih atau pun dipilih sebagai anggota legislatif. Hanya saja realitas dunia politik yang terjadi di Indonesia belum lagi memberikan ruang gerak yang sama antara perempuan dan laki-laki sehingga menjadikannya termarginalisasi dalam proses dan dinamika politik tersebut. Bahkan mereka cenderung menjadi alat mobilisasi kepentingan partai politik terutama menjelang pemilu.

Teralienasinya perempuan dalam kehidupan politik nampaknya berimplikasi pada tingkat pemahamannya terhadap persoalan politik sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian ini. Mayoritas responden penelitian pemahaman politiknya masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Pemahaman mereka hanya baik untuk hal-hal yang terkait dengan dunia politik riil seperti kekuasaan presiden, pelaksanaan pemilu dan pelayanan birokrasi.

Sejalan dengan tingkat pemahaman politik yang superfisial ini maka derajat identifikasi kepartaian dari perempuan pun umumnya lemah dan juga dalam hal memberikan dukungan terhadap partai yang menjadi pilihannya. Tentunya kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sementara pihak untuk melakukan mobilisasi bagi kepentingannya memenangkan pemilu.

Sebagaimana konstruksi teori perilaku memilih yang meyakini bahwa tingkat pemahaman politik seseorang serta identifikasi kepartaian akan berimplikasi terhadap perilaku memilihnya. Ternyata temuan penelitian memperkuat bangun teori ini.

Secara signifikan kedua variabel prediktor ini berpengaruh kepada perilaku memilih sekalipun pengaruhnya hanya sebesar 25,8%. Di sisi lain, identifikasi kepartaian menjadi determinan yang lebih besar kontribusinya dibandingkan variabel lainnya.

Temuan penelitian juga memberikan indikasi bahwa terjadinya ketimpangan jender dalam dunia politik menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki dalam pemilu.

## **B. Saran**

Kajian terhadap perilaku memilih tidak akan pernah final karena variabel penjelasnya cenderung berbeda setiap pemilu berlangsung atau bersifat temporer. Dengan demikian apa yang telah dihasilkan oleh penelitian ini belumlah komprehensif dan memuaskan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terutama untuk melacak lebih dalam dan ilmiah tentang perilaku memilih pada pemilu 2004 yang baru saja berlangsung.

Penelitian tersebut akan sangat menarik mengingat terjadi perubahan dalam sistem pemilu, kompetisi antar partai yang semakin ketat, munculnya meteor politik baru yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu terdapat nuansa kebebasan dan pemilihan langsung serta tidak berfungsinya partai politik dalam upaya memenangkan kandidat yang diusungnya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tentu diperlukan kecermatan dalam memilih variabel-variabel penjelas yang digunakan untuk mengungkap perilaku memilih pada pemilu 2004 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irawan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. 1999. *Peran Wanita dalam Orsospol di Kotamadya Medan 1992-1997*. Laporan Penelitian USU Medan.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1974. *Comparative Politics Today*. Boston : Little Brown and Co.
- , 1985. "The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations", diterjemahkan oleh Sahat Simamora, *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Czudnowski, Moshe M. 1976. *Comparing Political Behavior*. London : Sage Publication inc.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , 1992. *Menjelaskan Voting Behavior di Indonesia : Kasus Yogyakarta*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional IX AIPI, Surabaya, 6-8 Agustus.
- , 1996. *Sebuah Catatan Untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UGM Yogyakarta, 12 Desember 1996.
- Hadiz, Liza, dkk. 1998. *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia*. Makalah Hasil Penelitian LBH-APIK.
- Irish, Marian D. dan Elke Frank. 1978. *Introduction to Comparative Politics*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Kavanangh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kerlinger, Fred N. 1993. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kristiadi, Josef. 1993. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih : Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Banjarnegara Jawa Tengah Pada Pemilu 1971 - 1987*. Disertasi - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Morita, Rina. "Suara Perempuan" dalam *Harian Singgalang*, 16 Mei 1999.

- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 1998. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Pomper, Gerald. 1975. *Voter's Choice : Varieties of American Electoral Behavior*. New York : Doad, Mead Company.
- Randall, Vicky. "Women in Politic" dalam Faisal Siagian. 1996. *Keterwakilan Wanita Indonesia di Lembaga Legislatif*. Jakarta : Analisis CSIS.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1983. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Salviana, Vina. 1995. "Wanita dalam Kehidupan Politik" dalam *Suara Wanita*. Malang : Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Brawijaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1984. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Stepan, Alfred. 1978. *The State and Society Peru in Comparative Perspective*. Princenton University Press.
- Uhlen, Anders. 1997. *Indonesia and the Third Wave of Democratization : The Indonesian Pro Democracy Movement in a Changing World*. London : Curzon Press.
- Wasby, Stephen L. 1970. *Political Science - The Discipline and Its Dimensions : An Introduction*. New York : Charles Scribner's Sons.
-

# RAW DATA

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV NEGERI PADANG

data-lit dm

	x1	x2	y
1	4.00	3.00	2.00
2	3.00	4.00	2.60
3	2.20	3.00	2.80
4	2.50	3.40	3.00
5	2.60	3.20	3.00
6	3.20	2.70	3.20
7	5.00	2.60	2.00
8	3.40	2.40	2.00
9	2.30	2.60	2.50
10	3.50	3.00	2.80
11	2.70	2.40	3.20
12	3.30	2.20	3.40
13	4.00	2.50	3.00
14	3.20	2.50	3.00
15	2.90	3.00	4.00
16	2.80	3.00	3.40
17	2.60	2.60	3.00
18	2.60	3.00	2.60
19	3.50	2.70	2.60
20	3.20	2.80	2.60
21	2.80	3.00	2.00
22	2.90	2.40	2.00
23	2.80	2.50	2.00
24	3.00	2.50	2.50
25	3.00	3.00	3.40
26	2.60	3.00	3.50
27	4.00	2.90	3.00
28	2.60	2.50	2.00
29	2.90	2.80	2.20
30	2.90	3.00	2.40
31	3.70	3.00	3.50
32	3.50	3.00	3.00
33	2.80	2.80	3.00
34	2.80	2.90	2.70
35	3.00	2.00	2.80
36	3.20	2.20	2.80
37	3.20	2.30	2.90
38	4.50	3.00	3.00
39	3.40	3.20	3.50
40	3.20	3.00	4.00

## data-lit dm

	x1	x2	y
41	4.00	2.70	4.00
42	3.40	2.50	3.00
43	2.80	2.70	2.70
44	3.00	2.60	2.70
45	2.90	2.60	2.80
46	2.70	3.00	2.80
47	2.70	2.50	3.00
48	3.20	2.40	3.00
49	3.30	2.40	3.20
50	3.20	2.00	3.20
51	2.60	3.00	2.90
52	2.60	3.00	2.70
53	2.60	2.50	2.50
54	3.00	2.50	2.70
55	3.00	2.60	2.60
56	3.00	2.60	2.50
57	3.20	2.40	2.00
58	3.40	2.40	2.40
59	3.50	2.30	2.30
60	3.60	2.40	2.00
61	2.90	2.20	2.00
62	3.00	2.00	2.00
63	3.00	3.10	3.50
64	2.90	3.00	3.00
65	2.60	2.80	3.00
66	2.80	2.50	2.00
67	2.60	2.00	1.00
68	2.90	2.00	1.50
69	3.20	3.00	3.00
70	2.60	2.60	2.00
71	2.50	2.40	2.40
72	2.40	2.00	3.00
73	2.50	2.00	3.00
74	2.60	4.00	3.00
75	2.60	3.00	3.00
76	3.00	3.50	2.70
77	3.00	3.00	2.00
78	3.40	2.70	2.50
79	3.20	2.70	3.00
80	3.20	2.70	2.20



data-lit dm

	x1	x2	y
81	2.90	2.00	2.00
82	2.80	2.20	2.10
83	2.70	2.50	2.20
84	2.50	2.50	2.50
85	2.50	2.00	2.60
86	2.70	2.00	4.00
87	3.20	3.00	4.00
88	3.10	2.50	3.50
89	3.10	2.50	2.60
90	3.20	3.00	3.00
91	2.80	2.10	2.40
92	2.80	2.20	2.00
93	2.70	2.00	2.00
94	2.90	2.10	2.50
95	3.00	2.20	2.50
96	3.00	2.30	3.00
97	3.00	3.00	3.00
98	3.00	3.00	3.00
99	3.00	2.40	2.40
100	2.70	2.00	2.00
101	2.80	2.50	2.60
102	2.60	2.40	2.50
103	2.60	2.40	2.80
104	2.60	3.00	3.00
105	2.90	3.00	3.00
106	2.90	2.00	2.20
107	3.10	2.00	2.00
108	3.10	3.50	3.00
109	3.00	2.00	2.00
110	3.00	3.20	2.40
111	3.00	2.50	2.50
112	3.00	2.60	2.00
113	2.70	2.50	2.00
114	2.80	2.70	3.50
115	2.70	3.00	3.00
116	2.80	3.00	3.00
117	2.90	2.80	2.20
118	3.00	2.80	2.50
119	3.00	2.50	2.00
120	2.80	2.30	2.40

data-lit dm

	x1	x2	y
121	2.70	1.80	2.00
122	2.50	1.00	2.00
123	2.50	2.00	1.50
124	3.20	2.00	1.00
125	3.20	1.00	1.00
126	3.00	1.80	1.00
127	3.00	1.70	2.00
128	3.00	1.50	2.00
129	3.00	2.00	2.20
130	2.90	2.00	2.50
131	2.90	2.60	2.50
132	2.90	2.80	2.60
133	3.30	2.00	2.60
134	3.30	2.00	2.00
135	3.40	2.00	2.00
136	4.00	3.00	3.00
137	4.00	3.50	3.00
138	2.90	3.50	3.00
139	2.90	4.00	3.00
140	2.90	3.00	2.40
141	3.40	3.00	2.40
142	3.40	3.00	2.20
143	3.50	2.80	2.40
144	3.20	2.70	2.20
145	3.00	2.70	2.00
146	3.00	2.70	2.00
147	3.20	2.20	2.00
148	2.90	2.20	1.00
149	2.70	2.30	1.00
150	2.60	2.30	2.10
151	2.40	1.50	2.40
152	2.70	1.80	2.50
153	2.40	1.80	1.00
154	3.00	2.00	2.00
155	3.00	2.00	2.00
156	3.50	1.00	3.00
157	3.30	2.70	2.00
158	4.00	2.90	2.50
159	2.80	2.60	3.00
160	2.80	2.70	2.50

data-lit dm

	x1	x2	y
161	2.00	2.00	2.00
162	2.50	2.00	2.00
163	2.70	1.00	1.50
164	2.50	1.50	2.00
165	2.00	3.00	2.00
166	3.40	3.00	3.00
167	3.50	2.60	2.00
168	3.00	3.00	2.00
169	2.90	2.00	1.50
170	2.50	3.00	1.50
171	2.50	2.50	2.00
172	3.00	2.60	3.00
173	4.50	3.00	3.00
174	4.00	2.60	3.00
175	4.20	3.00	2.70
176	3.60	3.00	2.50
177	3.20	2.80	2.50
178	2.70	2.70	2.40
179	2.80	2.00	2.00
180	2.90	2.10	1.00
181	3.00	1.80	1.50
182	3.20	1.00	1.00
183	3.40	2.00	2.50
184	2.70	2.20	2.20
185	2.70	1.00	2.00
186	2.70	3.00	3.00
187	3.10	2.60	2.50
188	2.80	2.20	2.00
189	2.70	2.40	2.00
190	2.70	2.40	2.00
191	2.80	2.00	3.00
192	2.90	2.00	2.50
193	2.20	1.00	2.00
194	3.20	1.50	2.00
195	3.20	1.80	3.00
196	3.00	2.00	2.50
197	2.50	2.00	2.00
198	2.50	1.00	1.00
199	2.00	1.00	2.00
200	3.40	3.00	3.00

# **CORRELATIONS AND REGRESSION**

## Correlations

Correlations

		p.politik	p.memilih
p.politik	Pearson Correlation	1	,202**
	Sig. (2-tailed)	,	,004
	N	200	200
p.memilih	Pearson Correlation	,202**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,
	N	200	200

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Correlations

Correlations

		i.partai	p.memilih
i.partai	Pearson Correlation	1	,507**
	Sig. (2-tailed)	,	,000
	N	200	200
p.memilih	Pearson Correlation	,507**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,
	N	200	200

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Regression

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	i.partai, p.politik <sup>a</sup>	,	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: p.memilih

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,515 <sup>a</sup>	,265	,258	,53286

a. Predictors: (Constant), i.partai, p.politik

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,166	2	10,083	35,511	,000 <sup>a</sup>
	Residual	55,937	197	,284		
	Total	76,103	199			

a. Predictors: (Constant), i.partai, p.politik

b. Dependent Variable: p.memilih

# T-Test

	t1	t2
1	2.00	3.00
2	2.60	3.00
3	2.80	3.00
4	3.00	3.40
5	3.00	3.50
6	3.20	4.00
7	2.00	4.00
8	2.00	4.00
9	2.50	4.20
10	2.80	4.20
11	3.20	3.00
12	3.40	3.50
13	3.00	3.50
14	3.00	3.50
15	4.00	2.90
16	3.40	2.90
17	3.00	4.00
18	2.60	4.00
19	2.60	2.90
20	2.60	3.00
21	2.00	3.00
22	2.00	3.70
23	2.00	3.80
24	2.50	3.40
25	3.40	2.60
26	3.50	2.60
27	3.00	2.80
28	2.00	4.50
29	2.20	5.00
30	2.40	4.40
31	3.50	4.00
32	3.00	2.70
33	3.00	2.50
34	2.70	2.50
35	2.80	2.00
36	2.80	2.00
37	2.90	3.00
38	3.00	2.50
39	3.50	2.50
40	4.00	3.50

	t1	t2
41	4.00	2.80
42	3.00	2.80
43	2.70	4.00
44	2.70	3.40
45	2.80	3.50
46	2.80	3.00
47	3.00	3.00
48	3.00	3.20
49	3.20	2.80
50	3.20	2.70
51	2.90	2.00
52	2.70	2.50
53	2.50	3.50
54	2.70	2.00
55	2.60	2.00
56	2.50	2.20
57	2.00	2.00
58	2.40	1.50
59	2.30	2.90
60	2.00	2.50
61	2.00	2.50
62	2.00	1.00
63	3.50	1.80
64	3.00	3.00
65	3.00	2.00
66	2.00	3.60
67	1.00	5.00
68	1.50	2.00
69	3.00	1.80
70	2.00	2.00
71	2.40	2.50
72	3.00	2.50
73	3.00	3.00
74	3.00	3.00
75	3.00	3.10
76	2.70	3.00
77	2.00	4.00
78	2.50	2.50
79	3.00	2.50
80	2.20	2.00



	t1	t2
81	2.00	3.00
82	2.10	2.10
83	2.20	1.50
84	2.50	2.20
85	2.60	2.00
86	4.00	4.00
87	4.00	2.20
88	3.50	1.00
89	2.60	1.80
90	3.00	3.00
91	2.40	2.00
92	2.00	2.80
93	2.00	2.50
94	2.50	2.00
95	2.50	2.00
96	3.00	3.00
97	3.00	3.00
98	3.00	3.00
99	2.40	2.20
100	2.00	2.00
101	2.60	.
102	2.50	.
103	2.80	.
104	3.00	.
105	3.00	.
106	2.20	.
107	2.00	.
108	3.00	.
109	2.00	.
110	2.40	.
111	2.50	.
112	2.00	.
113	2.00	.
114	3.50	.
115	3.00	.
116	3.00	.
117	2.20	.
118	2.50	.
119	2.00	.
120	2.40	.

	t1	t2
121	2.00	.
122	2.00	.
123	1.50	.
124	1.00	.
125	1.00	.
126	1.00	.
127	2.00	.
128	2.00	.
129	2.20	.
130	2.50	.
131	2.50	.
132	2.60	.
133	2.60	.
134	2.00	.
135	2.00	.
136	3.00	.
137	3.00	.
138	3.00	.
139	3.00	.
140	2.40	.
141	2.40	.
142	2.20	.
143	2.40	.
144	2.20	.
145	2.00	.
146	2.00	.
147	2.00	.
148	1.00	.
149	1.00	.
150	2.10	.
151	2.40	.
152	2.50	.
153	1.00	.
154	2.00	.
155	2.00	.
156	3.00	.
157	2.00	.
158	2.50	.
159	3.00	.
160	2.50	.

	t1	t2
161	2.00	.
162	2.00	.
163	1.50	.
164	2.00	.
165	2.00	.
166	3.00	.
167	2.00	.
168	2.00	.
169	1.50	.
170	1.50	.
171	2.00	.
172	3.00	.
173	3.00	.
174	3.00	.
175	2.70	.
176	2.50	.
177	2.50	.
178	2.40	.
179	2.00	.
180	1.00	.
181	1.50	.
182	1.00	.
183	2.50	.
184	2.20	.
185	2.00	.
186	3.00	.
187	2.50	.
188	2.00	.
189	2.00	.
190	2.00	.
191	3.00	.
192	2.50	.
193	2.00	.
194	2.00	.
195	3.00	.
196	2.50	.
197	2.00	.
198	1.00	.
199	2.00	.
200	3.00	.

# T-Test

## One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
p.milih.pr	200	2.4720	.61841	.04373
p.milih.lk	100	2.8690	.81075	.08107

## One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
p.milih.pr	56,531	199	,000	2.4720	2.3858	2.5582
p.milih.lk	35,387	99	,000	2.8690	2.7081	3.0299

t

## Analisis Different of Mean Test

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{n_1 \cdot SD_1^2 + n_2 \cdot SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2}\right) \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}\right)}}$$

$$t = \frac{2.472 - 2.869}{\sqrt{\left(\frac{200 \cdot (0.618)^2 + 100 \cdot (0.81)^2}{200 + 100 - 2}\right) \left(\frac{200 + 100}{200 \cdot 100}\right)}}$$

$$t = \frac{-0.397}{\sqrt{\left(\frac{123.6 + 81}{298}\right) \left(\frac{300}{20000}\right)}}$$

$$t = \frac{-0.397}{\sqrt{0.01}}$$

$$t = \frac{-0.397}{0.1}$$

$$t = -3.97$$



## **6. Pengalaman Penelitian dan Publikasi**

### **6.1 Penelitian**

- a. Budaya Politik Suku Bangsa Minangkabau dan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Pada Elit Desa Sumatera Barat), 1998 (Penelitian).**
- b. Pengetahuan Politik Guru-guru Wanita Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Padang), 1998 (Penelitian).**
- c. Kontribusi Penggunaan Kuasa Kepala Sekolah Terhadap Kematangan Guru di Komplek Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, 1998 (Penelitian).**
- d. Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitan Orde Baru (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang), 2000 (Penelitian Dibiayai Proyek P2IPT Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas).**
- e. Faktor-faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), 2001. (Penelitian Dibiayai Proyek Peningkatan SDM Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas).**

### **6.2 Publikasi Ilmiah Lainnya**

- a. Sistem Politik Indonesia dalam Analisa Historis, 1994 (Buku Teks).**
- b. Sistem Politik : Suatu Pengantar, 1996 (Buku Teks).**
- c. Partai Politik, 1996 (Buku Teks).**
- d. LSM dan Civil Society di Indonesia, 1997 (Buku Teks).**
- e. Partisipasi Politik Masa Orde Baru, 1998 (Buku Teks).**
- f. Gerakan Mahasiswa Masa Kekuasaan Rezim Soeharto, 1998 (Buku Teks).**
- g. Perkembangan Ilmu Politik, 1999 (Buku Teks).**
- h. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Tingkat FIS-UNP).**

- i. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 2000 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat FIS-UNP).
- j. Perilaku Memilih Generasi Muda di Padang, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Sosiohumanika-UGM Yogyakarta).
- k. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2001 (Artikel Ilmiah pada Jurnal Tingkat FIS-UNP).
- l. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, 2001 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat FIS-UNP).
- m. Marjinalisasi Tenaga Kerja Wanita dalam Sistem Ekonomi Pasar, 2002 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Humanus FBSS-UNP).

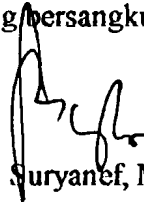
#### 7. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Kegiatan
1.	Penatar P4 Mahasiswa Baru Univ. Bung Hatta dan AKBP Padang Tahun 1993.
2.	Pembimbing Pemusatan Latihan Regu LCT P4 Kota Padang, 1993.
3.	Memberikan Ceramah Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Desa Sumue Bana Kayu Tanam Padang Pariaman, 1993.
4.	Membimbing Kontingen Padang pada Lomba P2P4 Tingkat Nasional Tahun 1994.
5.	Pelayanan Peningkatan Kemampuan Guru SD dalam PPKN di Kec. Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, 1995.
6.	Memberikan Penyuluhan Hukum dan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat Sei Talang Timur Kec. Guguk 50 Kota, 1995.
7.	Membimbing dan Membina Pelaksanaan KEJAR Simulasi P4 pada BP7 Kodya Padang, 1995.
8.	Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN di SMU Swasta Kodya Padang, 1998.
9.	Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN Bagi Guru-guru SD di Kodya Padang Panjang, 1999.
10.	Peningkatan Pengetahuan Politik, Pengembangan Keterampilan Menggunakan Metode dan Alat Peraga Yang Tepat dalam Mata Pelajaran PPKN Bagi Guru-guru SD di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang (Kegiatan Penerapan IPTEKS – Sumber dana DEPDIKNAS Tahun 2001)
11.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Kota Padang, 2001.

12.	Pelatihan dan Penerapan Keterampilan Menggunakan Model-model Metode VCT dalam Pembelajaran PPKN Bagi Guru-guru SMU Negeri Kota Padang, 2001.
-----	--

Padang, Februari 2002

Yang bersangkutan,



Drs. Suryanef, M.Si.





P2IPT Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas).

b. Faktor-faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), 2001. Penelitian Dibiayai Proyek Peningkatan SDM Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas.

## 5.2 Publikasi Ilmiah Lainnya

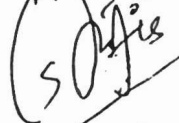
- a. Sistem Politik Indonesia dalam Analisa Historis, 1994 (Buku Teks).
- b. Sistem Politik : Suatu Pengantar, 1996 (Buku Teks).
- c. Partai Politik, 1996 (Buku Teks).
- d. LSM dan Civil Society di Indonesia, 1997 (Buku Teks).
- e. Partisipasi Politik Masa Orde Baru, 1998 (Buku Teks).
- f. Gerakan Mahasiswa Masa Kekuasaan Rezim Soeharto, 1998 (Buku Teks).
- g. Perkembangan Ilmu Politik, 1999 (Buku Teks).
- h. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- i. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 2000 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- k. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2001 (Artikel Ilmiah pada Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- l. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, 2001 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- m. Marjinalisasi Tenaga Kerja Wanita dalam Sistem Ekonomi Pasar, 2002 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Humanus FBSS-UNP).

## 7. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Kegiatan
1.	Membimbing dan Membina Pelaksanaan KEJAR Simulasi P4 pada BP7 Kodya Padang, 1995.
2.	Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN di SMU Swasta Kodya Padang, 1998.
3.	Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN Bagi Guru-guru SD di Kodya Padang Panjang, 1999.
4.	Peningkatan Pengetahuan Politik, Pengembangan Keterampilan Menggunakan Metode dan Alat Peraga Yang Tepat dalam Mata Pelajaran PPKN Bagi Guru-guru SD di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang (Kegiatan Penerapan IPTEKS – Sumber dana DEPDIKNAS Tahun 2001)
5.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Kota Padang, 2001.
6.	Pelatihan dan Penerapan Keterampilan Menggunakan Model-model Metode VCT dalam Pembelajaran PPKN Bagi Guru-guru SMU Negeri Kota Padang, 2001.

Padang, Februari 2002

Yang bersangkutan,



Dra. Al Rafni, M.Si.